

BAB II

PERKEMBANGAN KAPITALISME GLOBAL DAN GAGASAN DASAR NEOLIBERALISME

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh pencapaian yang telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas. Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptanya. Dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan.

Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yang akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tersebut dengan memperkecil turut campurnya aturan pihak lain.

Masyarakat yang bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kesempatan dan kompetisi. Kepentingan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis. Sejak masa kehancuran *Wall Street* (dikenal dengan masa depresi besar atau *Great Depression*) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih dikuasai wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan. Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal yang layak,

mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Dalam konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods tersebut, yang bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi dimasa sesudah perang, negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik dinegara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide liberal sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri, tapi juga ditingkat globaldi IMF dan World Bank.

Di Inggris, Keith Josep menjadi arditex "Thatcherisme". Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran John Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme". Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

A. Perkembangan Kapitalisme Global

Pada dasarnya gagasan neo liberalisme tidak terlepas dari perkembangan sistem ekonomi kapitalisme, karena ide dasar kapitalisme adalah berawal dari tradisi filsafat liberal. Ide dasar teori ekonomi kapitalisme ditancapkan oleh Adam Smith melalui buku termasyhurnya "*The Wealth of Nation*". Ciri mendasar gagasan kapitalisme adalah pemaksimalan keuntungan pribadi dalam kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan. Sebagaimana Smith mengemukakan dalam karya termasyhurnya, individu sebagai pelaku yang bebas untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan publik. Sehingga sistem kapitalisme tidak ada pembatasan seseorang atau individu melakukan kegiatan ekonomi untuk akumulasi kapital yang sebesar-besarnya. Dalam karyanya Smith, meletakkan gagasan bahwa kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat, ia mengemukakan sebagai berikut³²:

³² Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 32

"Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita, tidaklah dari keajaiban dari si tukang daging, si tukang masak, bir atau tukang roti, melainkan apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan kejar hanyalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Disini ia dituntun oleh tangan-tangan tak terlihat (the invisible hands) untuk mengejar tujuan yang bukan merupakan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa ia juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti sesuatu yang lebih buruk bagi masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud untuk memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kebaikan publik."

Munculnya gagasan neoliberalisme tidak terlepas dari konteks dialektika sejarah global. Semangat tersebut muncul dengan seiring kondisi global pada saat itu terjadi resesi ekonomi dunia akibat PD I dan II. Yang mengakibatkan kelaparan, pengangguran, ketidakadilan. Tepatnya pada pertengahan abad kedua puluh setelah terjadinya peristiwa keruntuhan pasar saham Wall Street dan disusul dengan Perang Dunia II. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok juga membendung ancaman komunisme. Pada masa itu Uni Soviet bersemangat untuk menawarkan konsep ekonomi kesejahteraan untuk mengurangi depresi dunia akibat Perang Dunia II. Namun langkah Uni Soviet diikuti dengan paket ekonomi AS melalui konsep pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan kapitalisme, Dillard membagi perkembangan kapitalisme menjadi tiga periode yaitu:

1. Periode Kapitalisme Awal (1500-1750)

Pada awal perkembangan kapitalisme didorong keinginan manusia untuk berusaha dengan semangat individualisme sebagai penentangan dan terhadap eksploitasi kejam yang dilakukan oleh feodalisme. Seperti feodalisme yang ada di Romawi dan Yunani muncul dari kelas militer dan di Eropa Tengah muncul dari kelas tuan tanah, kemudian menempatkan kedua kelas ini sebagai kelas satu-satunya pemegang hak atas kepemilikan alat produksi.³³ Pada masa ini sekitar di akhir abad XIV dan awal abad XV, kelahiran kapitalisme ini didorong oleh tiga tokoh besar yaitu:³⁴

a. Martin Luther King

Yang memberikan dasar-dasar teofisik. Dimana dalam penulisannya Luther King menentang otoritas Gereja Roma atas praktik pengampunan dosa yang dilakukan oleh pastur. Sehingga Luther meletakkan ajaran dasarnya bahwa:

“Manusia menurut kodratnya menjadi suram karena dosa-dosa dan mata-mata lewat perbuatan dan karya yang lebih baik saja, karena mereka dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kutukan abadi”.

b. Benyamin Franklin

Yang memberikan dasar filosofik. Semangat atau spirit yang dibawah Luther King, mendorong Franklin secara filosofik mengajak setiap orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal atas usaha sendiri. Franklin dan Luther King sangat menentang otoritas gereja Roma atas pengampunan dosa karena baginya

³³ Ibid, hlm.45

³⁴ Log.Cid

gereja menjadikan manusia pemalas bekerja dan yang menjadikan candu manusia. Sehingga penganjuaran Franklin yang terkenal yaitu: "Waktu adalah Uang".

c. Adam Smith

Kemudian secara rinci Adam Smith memberikan dasar-dasar ekonomi kapitalisme. Dalam karyanya yang terkenal "*An Inquiry The Nature and Causes of The Wealth Nations*". Dalam karyanya Adam Smith lebih jelas memberikan bahwa spirit kapitalisme dalam sebuah konsep mekanisme pasar. Ia mengatakan bahwa, barang langka akan menyebabkan harga barang-barang tersebut menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang berpengalaman rendah atau lebih dikenal dengan konsep "*laissez-faire*". Sehingga dalam perilaku produsen, kalau harga barang mahal maka keuntungan yang diterima pun semakin tinggi. Maka untuk mengatasi kelangkaan barang akan teratasi karena semakin banyak produsen yang memproduksinya sehingga barang semakin murah. Dan secara otomatis permasalahan yang dihadapi masyarakat diselesaikan oleh *the invisible hand* atau tangan ajaib.

Sehingga dalam perkembangan kapitalisme periode ini masih didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris sejak abad XVI sampai XVIII. Dalam perkembangan industri-industri mampu meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya meningkatkan surplus bagi pemilik alat produksi. Pada tahapan ini kapitalisme mengalami perluasan sehingga memunculkan kolonialisasi ke daerah-daerah lain. Dalam

tahapan ini menurut Dillard, perkembangan kapitalisme didukung oleh tiga faktor yaitu:³⁵

- a. Dukungan agama dengan menanamkan sikap dan karakter kerja keras serta anjuran untuk hidup hemat.
- b. Hadirnya logam mulia terhadap distribusi pendapatan atas upah, laba dan sewa.
- c. Keikutsertaan negara dalam membantu membentuk modal untuk usaha.

Pada tahapan ini walaupun industri besar belum pesat, tetapi pada dasarnya bahwa dalam perkembangan kapitalisme mengalami peningkatan surplus yang semakin meningkat. Apalagi dalam periode awal perkembangan kapitalisme bahwa keterlibatan negara mempunyai andil dalam perputaran modal. Sehingga negara mengakibatkan melakukan kolonialisasi pada wilayah yang lebih luas. Disamping itu juga karena adanya kapitalisme mendapat dukungan dari agama semakin mempermudah untuk melakukan kolonialisasi ke wilayah lain.

2. Periode Kapitalisme Klasik (1750-1914)

Pada periode kapitalisme klasik ini ide-ide Adam Smith yang mendorong negara kapitalis untuk melakukan ekspansi ke negara lain. Munculnya revolusi industri di Inggris mendorong model produksi dari berdagang dan kerajinan tangan menjadi buruh pabrik. Dorongan ini diakibatkan karena ditemukannya tenaga uap kemudian dijadikan mesin pemintal dan mesin tenun yang digunakan di pabrik-pabrik. Dalam perkembangannya kemudian terjadi kelebihan hasil produksi yang memaksa negara kapitalisme untuk melakukan ekspansi pasar ke negara lain.

³⁵ *Ibid*, hal. 49

Kurangnya persediaan produksi mendorong negara imperialis melakukan ekspansi ke negara lain untuk eksplorasi bahan mentah atas kekurangannya persediaan yang ada. Sehingga pada masa negara-negara kapitalisme mempunyai daerah koloni sebagai kebutuhan memperluas wilayah dan ekplorasi bahan mentah.

Keberhasilan revolusi industri Inggris selama pertengahan abad-18 menjadikannya menguasai pasar yang ada di dunia. Selama kejayaan Inggris sejak tahun 1830-1870 akhirnya berkurang setelah Perang Napoleon. Karena Inggris dalam mendapatkan bahan produksi berkurang, lebih diakibatkan karena adanya persaingan antara negara-negara kapitalisme. Yang kemudian mendorong terjadi perpecahan antara blok Timur dan Barat.

3. Periode Kapitalisme Lanjut (Paska 1914)

Peralihan periode kapitalisme klasik menuju kapitalisme lanjut ditandai model produksi yang lebih maju karena didukung dengan industri-industri besar. Yang pada puncaknya kemudian mempertajam kontradiksi antara majikan dan buruh (modal dan kerja). Dan keinginan negara koloni untuk memperluas ekspansi wilayah yang lebih luas untuk eksploitasi buruh yang murah dan bahan baku yang murah. Pada puncaknya kemudian terjadi depresi besar akibat persaingan antara kapitalis dalam memperluas daerah koloni. Depresi besar membuka peluang bagi imperalisme, sehingga negara-negara kapitalisme melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Yang lebih diakibatkan kurangnya persediaan produksi yang diakibatkan peperangan. Peta geopolitik dua diwakili dua kubu yaitu: blok Barat yang diwakili AS dan blok Timur oleh US. Gelombang

kolonialisasi dan ekspansi dalam skala dunia mengarah pada pembagian antara Barat dan Timur atau disebut juga oleh Perang Dunia I (1874-1914). Pada masa Perang Dunia I Blok Barat seperti AS, Inggris, Perancis dan Jerman mengalami peningkatan industrialisasi manufaktur sebagai faktor penggerak utama, seperti industri kartun baja dan kereta api. Berikut merupakan tabel I yang mendorong kapitalisme memperoleh keuntungan yang sangat besar.

TABEL I
PENDORONG UTAMA INDUSTRIALISASI DI
INGGRIS, PERANCIS, JERMAN DAN AS

	Kartun	Besi	Jalan Kereta Api
INGGRIS RAYA			
Ekspansi maksimum	1780-89	1790-99	1830-39
Industri terkemuka	1780-69	1780-89	1830-79
PERANCIS			
Ekspansi maksimum	1815-	1850-59	1840-49
Industri terkemuka		1850-55	1840-89
JERMAN			
Ekspansi maksimum	1830	1850-59	1840-49
Industri terkemuka		1850-59	1840-89
AS			
Ekspansi maksimum	1805-1815	1840-49	1830-39
Industri terkemuka	1820-1879	1840-1920	1830-99

Sumber: diambil dari Breud, hal. 94 yang mengutip Rostow, The World Economy

Pada era industrialisasi sebenarnya didorong oleh revolusi industri di Inggris kemudian diikuti oleh perkembangan kapitalisme mengarah pada kapitalisme industri. Sehingga corak produksi kapitalisme mengakibatkan bermunculan pabrik-pabrik manufaktur yang menyebar diberbagai kawasan benua Eropa seperti Belgia, Prancis Jerman, Swiss dan Jerman.³⁶ Lambat laun masyarakat yang pekerjaannya berdagang menjadi buruh-buruh pabrik sehingga terjadi kontradiksi antara kelas borjuasi dan buruh. Menurut Breud bahwa terjadinya krisis pada

³⁶ Majalah TRADEM, *Tangan ajaib di balik arus struktural global*, edisi V, Yogyakarta, 2003, hal. 7

kapitalisme karena terdapat kontradiksi mendasar sehingga mengakibatkan depresi besar yaitu:³⁷

- a. Kontradiksi modal dan buruh yaitu secara kongret antara perusahaan kapitalis dengan kelas buruh.
- b. Kontradiksi antar kapitalis dan kapitalis (baik dalam sektor yang sama maupun berbagai sektor).
- c. Kontradiksi antara kapitalisme nasional.

Kontradiksi ini berwujud dalam persaingan antara kapitalisme nasional di seluruh dunia yang berbuntut pada Perang Dunia Pertama. Hal ini disebabkan oleh perebutan akses bahan mentah dan pasar baru di negara yang didominasi.

- d. Kontradiksi antar kapitalisme dominan dengan negara, wilayah ataupun rakyat yang didominasinya.

Empat kontradiksi yang dimaksud paling menentukan menurut Breud adalah kontradiksi antara buruh dan majikan (modal dan kerja) dan kontradiksi antar kapitalisme nasional. Sehingga pada periode tersebut tepatnya pada masa Perang Dunia Pertama, terjadi kontradiksi antara kapitalisme nasional yaitu kapitalisme Jerman dan Amerika Utara untuk menentang hegemoni Inggris. Yang akhirnya perang terbagi dua blok Barat yang dikuasai Amerika Serikat dan Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Kesuksesan secara ekonomis kemudian mendorong kesuksesan di bidang politik, yaitu hubungan antara kapitalis dengan negara. Pada proses ini sangat menguntungkan sistem kapitalisme itu sendiri. Karena dengan melalui daerah eksploitasi dan perluasan daerah-daerah kekuasaan

³⁷ Ibid, hal. 8

sebagai tempat untuk distribusi hasil yang berlimpahan (*over produksi*) yang ada di negara kapitalisme.

Pada fase kapitalisme lanjut perkembangan kapitalisme tidak bersifat traditional. Artinya pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika menyebabkan peta politik dunia sudah mulai berubah. Perbedaan yang lain dari kapitalisme lanjut adalah kemunculan korporasi-korporasi (MNC/TNC). Kehadirannya mempertegas bahwa bahwa pelaku ekonomi sesungguhnya bukanlah institusi negara, melainkan para pengusaha yang bermodal besar. Negara dalam hal ini sebagai pelengkap untuk mendukung perputaran arus modal yang dikendalikan oleh kapitalis. Karena para kapitalis beranggapan peran negara masih tetap dibutuhkan untuk memfasilitasi setiap kegiatan ekonomi.

Perkembangan besar kapitalisme ditandai dengan krisis besar tahun 1960-an dan 1970-an akibat PD II. Negara kapitalis mengalami depresi ekonomi sangat besar akibat biaya ekspansi. Maka akibat dari krisis ini, pemerintah Amerika dan Eropa mempunyai tanggung jawab terhadap depresi tersebut. Kesadaran kuat tersebut didasari atas banyaknya pengangguran, kemiskinan yang besar akibat perang dunia II. Runtuhnya saham Wall Street dan disepakatinya Bretton Woods oleh negara-negara industri maju pada tahun 1944.

Pada pertemuan tersebut terjadi sebuah kesepakatan bahwa system pasar yang mengatur perekonomian dan menggagalkan teori ekonomi Keynesia. Yang dimana Keynes menyakini:

a. Bahwa pemerintah dapat dan harus melakukan intervensi dalam perekonomian.

Keikutsertaan pemerintah dalam membangun perekonomian ke arah *money and*

finance. Dalam perekonomian Keynesian masih diperlukan campur tangan negara dalam mengatasi kestabilan ekonomi, berbeda dengan neo-liberalisme yang menyatakan bahwa negara harus menjamin adanya pasar bebas serta membuat aturan yang merevisi aturan-aturan yang menghambatnya.

- b. Dalam doktrin Keynesian menyakini bahwa seiring dengan adanya inflasi maka tidak akan pernah muncul bersamaan dengan pengangguran. Doktrin tersebut gagal ketika terjadi lonjakan minyak dunia pada akhir tahun 1973, pada saat negara-negara Arab penghasil minyak dunia membentuk sebuah kartel, OPEC dan menyebabkan harga minyak yang melambung tinggi. Karena harga minyak yang terus meningkat terjadilah inflasi harga mencapai 20 persen yang diikuti pengangguran semakin meningkat serta meluasnya ketidakmampuan negara-negara Dunia Ketiga untuk membayar utangnya.³⁸
- c. Hancurnya teori Keynesian, kapitalisme selalu belajar dari kesalahan dan selalu memperbarui untuk merebutkan konsep pembangunan ekonomi yang ideal. Gelombang baru dipelopori oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan antara tahun 1979-1980. Yang menyatakan kegagalan Keynesian, karena campur tangan dan intervensi pemerintah. Tetapi lebih kedua tokoh tersebut lebih memilih pandangan-pandangan Milton Friedmen dan Friedrich Hayek. Pemikir menyatakan bahwa:

“Pasar bebas mampu mengalokasikan barang dan jasa secara lebih efektif dibandingkan negara. intervensi negara terhadap pasar hanya merugikan, karena peran negara hanyalah mengatur

³⁸ Editor: I. Wibowo dan Fancis Wahono, *Neoliberalisme*, Yogyakarta, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas 2003, hal. 19

kontrak, menyediakan mta uang yang stabil memastikan bahwa pelaku pasar tidak mengalami distorsi".³⁹

Konsolidasinaya dua pemimprn besar Inggris dan Amerika era Thatcher-Reagan membuat sejarah baru setelah kegagalan teori Keynisiian. Yang menancapkan ekonom kanan baru (*The new right*) atau neoliberalisme. Dua tokoh tersebut berperan terhadap hadirnya neoliberalisme di dunia. Yang dimana Thatcer lebih mengutamakan kebijakan moneterisme, yang lebih menekankan kontrol ketat terhadap *money supply* dan pemerintahan Reagan didominasi oleh ekonomi-ekonomi yang menganut *supply-side*, yang menyarankan pemotongan pajak guna memberikan insentif sebesar-besarnya bagi produksi.⁴⁰

B. Makna dan Gagasan Neoliberalisme

Seperti yang penulis singgung diawal BAB II, sesungguhnya gagasan neoliberalisme tidak lain adalah merupakan kebangkitan liberalisme. Yang membedakan keduanya antara liberalisme dan neoliberalisme menurut Mansour Fakih adalah *waktu dan konteks pemunculannya*, sehingga serangkaian skala dan strateginya sedikit berlainan karena menjawab persoalan yang terus berkembang pada masa berlainan.⁴¹ Kaum neoliberalis percaya pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui persaingan bebas.

Memahami neoliberalisme menurut B. Hery Priyono, neoliberalisme tidak hanya hubungan ekonomi sebagai modelnya melainkan model neoliberalisme yang mendasarinya adalah semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu

³⁹ Ibid., hal. 21

⁴⁰ *Log. Cid.*

⁴¹ Jurnal Wacana, *Krisis dan bencana pembangunan*, Yogyakarta, Insist Prees, 2000, hal. 8

persahabatan, keluarga, hukum, tata-negara, maupun hubungan international. Yang semua kegiatan tersebut didasarkan atas dasar untung dan rugi, baik itu relasi antara individu maupun sosial. Oleh sebab itu Hary Priyono menggambarkan bagaimana mula-mula neoliberalisme terjadi:⁴²

1. Hubungan antar individu dan sosial kita selalu diukur dengan konsep dan tolak ukur ekonomi atau manusia adalah (*homo economicus*). Dalam pandangannya menjelaskan bahwa manusia secara ontologi adalah *economicus* yang mempunyai implikasi terhadap *epistemologi* (cara pandang). Sehingga dalam hubungan individu.
2. Prinsip ekonomi menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi sebagai berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah suatu negara. Jika pada liberalisme klasik abad 18 menuntut pemerintah untuk kinerja pasar sebagai salah satu cara yang paling efisien. Sehingga segala bentuk kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pasar bebas. Oleh sebab itu pemikir ekonom klasik Adam Smith (1723-1790) memberikan penjelasan bahwa jika pemerintah terlalu mengatur dan mencampuri persoalan transaksi ekonomi, akan mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan individu. Sehingga tugas pemerintah menurut Smith hanya sebagai berikut:⁴³

“..... Pemerintah punya tugas yang amat sangat penting, dan yang begitu lugas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama, tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Kedua, tugas untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga

⁴² I. Wibowo dan Fancis Wahono . *Neoliberalisme Op. Cit.*,hal. 54-56

⁴³ *Log. Cid.*

masyarakat dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata-keadilan. Ketiga, tugas untuk mengadakan serta mempertahankan prasarana public dan berbagai public yang ada bukan hanya bagi kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu....."

Memahami kebijakan neoliberalisme selalu memaksakan agenda-agenda *privatisasi*, berbeda dengan liberalisme klasik pada abad ke 18 yang masih memberikan peluang kuat untuk mengontrol atas kehidupan ekonomi seperti yang terjadi pada masa Merkantilisme. Neoliberalisme melihat bahwa negara tidak punya alasan apapun untuk mencampuri dan mengawasi pasar, karena pasarlah yang justru harus merupakan yang mendasari negara. Pasar menjadi tolah ukur terhadap kebijakan suatu negara.

Ciri kedua kebijakan neoliberalisme yaitu deregulasi. Deregulasi dipergunakan untuk memuluskan mekanisme pasar melalui revisi terhadap kebijakan negara yang masih melakukan proteksi terhadap pasar. Karena bagaimanapun juga gagasan neoliberalisme tentang peran negara, negara diharuskan mempertahankan peran tradisional sebagai penjaga modal juga memfasilitasi adanya mekanisme pasar bebas. Sehingga kebijakan negara tidak mengutamakan kepentingan publik tetapi lebih mementingkan para kapitalis. Yang terjadi adalah persoalan pengangguran, kemiskinan dan sebagainya bukan persoalan sosial tetapi masalah individual. Solusinya bagi kaum neoliberalis adalah bukan program sosial (seperti dalam *welfare sistem*) melainkan *individual*

self-care. Sehingga dapat dikatakan bahwa inilah pengalihan peran dari negara ke segelintir orang.

Ada beberapa faktor yang mendorong neoliberalisme dapat berkembang secara pesat. I. Wibowo memberikan penjelasan mengapa neoliberalisme mampu berkembang secara pesat yaitu: ⁴⁴

1. Munculnya perusahaan multinational (*multinational-coorporation- MNC*).
2. Munculnya organisasi atau "rejim international" yang berfungsi sebagai *surveillance system*.
3. Variable independent yaitu adanya revolusi teknologi di bidang tehnologi informasi dan transportasi.

C. Elemen-Elemen Pendukung Neoliberalisme

1. IMF

Dana Moneter International didirikan pada Juli 1944. Organisasi untuk membantu negara yang mengalami kesulitan ekonomi dan terkena krisis ekonomi yang dirancang oleh bank sentral international. Tanggung jawab IMF adalah mempromosikan kerjasama moneter international, memfasilitasi perluasan perdagangan international serta mendukung stabilitas nilai tukar dan lain-lain.⁴⁵

Sejarah berdirinya IMF tidak terlepas dari konsolidasi negara-negara imperialis bersama para ekonom neoliberalis. Ketika Perang Dunia II menunjukkan tanda-tanda kemenangan bagi AS dan sekutunya. Para wakil dari 45 negara pada bulan bertemu dalam konferensi Bretton Wood, negara bagaian New Hampshire, Amerika Serikat untuk menyusun suatu kerangka kerjasama ekonomi

⁴⁴ Ibid., hal 3-4.

⁴⁵ Edy S. Hamid, *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hal 114.

international paska perang. Kehancuran ekonomi yang diakibatkan oleh depresi besar pada tahun 1930-an yang berimplikasi pada hancurnya tata ekonomi international berupa lumpuhnya segenap kegiatan pasar-pasar finansial international dan merosotnya volume perdagangan international.

Sejumlah 45 negara yang ikut dalam konferensi tersebut menginginkan sebuah tata baru hubungan ekonomi international setelah Perang Dunia yang memungkinkan perluasan perdagangan dunia berdasarkan mata uang yang konvertibel. Muncullah gagasan bahwa perlu adanya sebuah institusi keuangan international yang bisa menggerakkan kembali ekonomi dunia. Maka lahirlah kesepakatan bersama untuk merumuskan dan terbentuklah *International Monetary Fund* (IMF) yang dibentuk untuk membangun kembali pasar baru dan modal serta merekonstruksi perekonomian di kawasan Eropa Barat yang tidak stabil akibat perang.

Konferensi Bretton Woods berlangsung dengan dijiwai oleh semangat serta keyakinan bahwa stabilitas pasar-pasar modal international merupakan unsur terpenting bagi terciptanya kembali kegiatan-kegiatan perdagangan dan investasi international yang penuh gairah. Semangat dan keyakinan itulah yang mendorong dibentuknya IMF yang kemudian disertai tanggung jawab untuk memantau dan menstabilkan *system financial international* melalui penyediaan dana-dana jangka pendek guna menanggulangi defisit neraca pembayaran suatu negara.⁴⁶

Untuk mengatur pembayaran maka harus dipergunakan mata uang yang konvertibel seperti dolar Amerika Serikat yang harganya dipatok berdasarkan

⁴⁶ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1998, hal. 134-135

harga emas. Namun setelah terjadi krisis hutang pada 1980-an, mata uang yang dianggap tidak hanya mata uang Amerika Serikat saja tetapi juga mata uang negara kuat lainnya seperti Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, dan Jepang. Bank-bank sentral juga menggunakan dolar sebagai alat transaksi internasional, karena penggunaan dolar mendapatkan bunga yang menguntungkan. Walaupun Uni Soviet dan Swiss tidak ikut dalam keanggotaan IMF, tetapi Uni Soviet ikut dalam konferensi yang dilakukan di Bretton Woods dan Swiss merupakan salah satu negara yang mempunyai nilai mata uang yang kuat. Walaupun demikian Swiss masih aktif dalam beberapa sub bidang kegiatan yang dilakukan.

IMF sebagai lembaga pengontrol moneter dunia mempunyai wewenang dalam memberikan saran, bantuan materiil dan tenaga ahlinya untuk membantu suatu pemerintahan yang mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan moneternya. IMF berfungsi sebagai lembaga inti dari system moneter internasional yang bertanggung jawab untuk menstabilkan dan mencegah krisis terhadap sistem tersebut dengan mengajak anggotanya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang efektif, dan juga membantu mengatasi masalah neraca pembayaran yang dihadapi anggotanya baik secara finansial maupun tehnis.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sedikit banyak merupakan tanggung jawab IMF, paling tidak IMF mempunyai peran yang sangat besar terhadap pemulihan krisis di Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1967, ketika Indonesia secara resmi menjadi anggota dari badan internasional, IMF merupakan seorang wakil tetapnya dan menugaskan di Bank Indonesia yaitu Bank Sentral

untuk mengadakan konsultasi-konsultasi harian dengan pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan tentang strategi stabilitas ekonomi. Setelah itu IMF mengirim ahli fiskalnya, Departemen Keuangan menjadi tuan rumahnya. Para ahli keuangan ini berpengaruh besar terhadap perubahan kebijakan keuangan Orde Baru, seperti Administrasi pajak, APBN, perdagangan, tarif impor, cukai dan lain-lain.

IMF dalam memberikan memberikan terapi kepada pasiennya (negara anggotanya), biasanya meminta agar dilakukan perubahan yang fundamental dalam hubungan antara negara dan pasar. Persyaratan-persyaratan ini disebut IMF *conditionality*. Dalam kasus Indonesia, IMF *conditionality* tersebut tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI), yakni program-program yang disepakati oleh kedua negara belah pihak (pemerintah Indonesia dan IMF) untuk melakukan perubahan ekonomi secara fundamental.

IMF beranggapan bahwa bahwa untuk semua negara hanya ada satu obat, yaitu dikenal dengan "*structural adjustment programs*" (SAP), yang dimana kebijakan SAP harus diterapkan kepada negara yang mengalami permasalahan ekonomi tanpa melihat potensi kekayaan suatu negara. Pada intinya kebijakan SAP itu adalah negara harus melakukan tiga pilar utama yaitu *liberalisasi*, *deregulasi* dan *privatisasi*. Tiga pilar tersebut kemudian dikenal dengan "*Washington Consensus*" yang isinya adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Disiplin fiskal (*fiscal discipline, fiscal austerity*)

⁴⁷ I. Wibowo dan Fancis Wahono, *Neoliberalisme Op. Cit.*, hlm. 119-121

Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif, dimana defisit anggaran tidak boleh lebih dari dua persen terhadap PDB (Program Domestik Bruto).

b. Perlunya adanya prioritas bagi pengeluaran publik (*public expenditure*).

Pemerintah harus berupaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja negara.

c. Reformasi pajak (*tax reform*)

Pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak (*broaden the base*).

Pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah, dan pemerintah perlu lebih kreatif dalam pemungutannya, dengan cara perluasan basisnya.

d. Liberalisasi finansial (*financial liberalization*)

Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian ketat bersaing, agar terjadi peningkatan efisiensi.

e. Kebijakan nilai tukar (*exchange rates policy*)

Yaitu pemerintah mempunyai memiliki kredibilitas, yang menjamin terdorongnya iklim persaingan (*competitiveness*). Terus mendorong liberalisasi perdagangan, dengan cara menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif (larangan-larangan) secara progresif.

f. Mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi.

g. Melakukan program privatisasi. Perusahaan milik negara atau BUMN dan kepemilikannya dialihkan pada swasta.

- h. Adanya deregulasi untuk mendorong mekanisme pasar bebas. Sehingga hambatan-hambatan yang menghalangi adanya pasar harus dihilangkan, supaya pasar menjadi kian kompetitif.
- i. Adanya jaminan bagi pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual (*intelektual property rights*), baik di sektor formal maupun non formal.

Hubungan Indonesia IMF semenjak krisis membuat semakin terpuruk, karena program-program IMF lebih memprioritaskan mekanisme pasar bebas. Walaupun dalam kenyataannya Indonesia memutuskan untuk mengakiri program pemulihan dengan IMF akhir tahun 2003. Tetapi pemilihan pemerintah yang menempuh pemantauan pasca keputusan kontrak *post program monitoring* (PPM), hanya memberi peluang IMF untuk mengintervensi kebijakan Indonesia. Karena menyisakan otoritas IMF untuk terus memantau kebijakan ekonomi Indonesia. Berikut tabel II kebijakan IMF atas kerjasama dengan IMF. Dengan melakukan program penyesuaian struktural dan LoI:⁴⁸

⁴⁸ Suharto, *Quo Vadis Peran IMF Bagi Perekonomian Indonesia*, Indonesia Keluar Dari IMF Jurnal UNISIA, Yogyakarta, 2003, hal. 387

Tabel II
Risalah butir-butir kebijakan Lenter of Intent IMF berahkir

No	Kelompok	Perkembangan			Jumlah
		Baru ¹	Lama ²	Lanjutan ³	
1	Restrukturisasi Perbankan				327
2	Restrukturisasi Hutang Swasta	56	20	38	114
3	Desentralisasi	22	2	17	41
4	Lingkungan	12	-	33	45
5	Fiskal	76	36	57	169
6	Perdagangan Luar Negeri	18	27	37	82
7	Deregulasi dan Investasi	19	25	12	56
8	Reformasi Hukum	31	11	17	59
9	Pinjaman dan Pemulihan Aset	75	23	33	131
10	Kebijakan Moneter dan Bank Sentral	44	48	13	105
11	Lain-lain	11	6	9	26
12	Privatisasi dan BUMN	39	20	61	120
13	Jaringan Pemgamanan Sosial	8	4	14	26
Total		582	279	440	1.301

Sumber Noorsy, Ichsanuddin, Makalah Seminar Indonesia Paska IMF, PPE UII 23 Juni 2003.

Keterangan :

1. Merupakan kebijakan baru yang belum pernah dicantumkan dalam LoI sebelumnya.
2. Merupakan penulisan kembali kebijakan serupa dalam LoI.
3. Merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan yang terdahulu.

Secara sederhana program penyesuaian struktural sangat merugikan kaum termarjinalkan karena tersebut memberikan adalah melakukan privatisasi dan

liberalisasi sektor publik. Suharto memberikan penjelasan tentang beberapa kategori program penyesuaian struktural yaitu:⁴⁹

- a. Pemotongan pengeluaran sosial (subsidi pemerintah) pada bidang pendidikan, kesehatan atau sektor publik lainnya.
- b. Pemotongan pegawai pemerintah, merubah hukum untuk membuat sector swasta lebih mudah dalam merumahkan pegawai, menekan upah minimum seperi yang terjadi di Haiti.
- c. Mendorong negara-negara yang dibantu untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan mekanisme pasar.

2. Perusahaan International (TNCs)

TNCs merupakan perusahaan yang memiliki kontrol terhadap perusahaan-perusahaan cabang di negara-negara lain dan negara dimana perusahaan induknya terdaftar. Karakteristik perusahaan international ditandai dengan:⁵⁰

- a. Berkecimpung dalam aktivitas bisnis—termasuk penjualan, distribusi, ekstraksi, manufaktur, penelitian dan pengembangan diluar negara asal yang menjadi pusat finansial dan operasional dari dua negara atau lebih.
- b. Keputusan menejemen didasarkan pada alternatitatif regional atau global. Yang dimana TNCs dapat berupa perusahaan publik dan juga perusahaan pribadi yang diperjualbelikan di bursa saham.

Pengaruh perusahaan international terhadap liberalisasi pasar yaitu perusahaan tersebut dijadikan alat untuk mempercepat adanya pasar bebas. Sehingga program penyesuaian struktural meliputi penggantian peran pemerintah

⁴⁹ Log.Cid.

⁵⁰ Majalah TRADEM, *Tangan Ajaib Dibalik Arus Struktural Global*, Op. Cit, hal. 47

terhadap pasar. Karena dengan hadirnya perusahaan internasional, perusahaan domestik tidak akan mampu bersaing dengan TNCs. Yang memaksa industri-industri domestik harus kalah bersaing dan gulung tikar. Sehingga tidak heran kemudian banyak penggusuran pada pasar-pasar tradisional yang akan digantikan dengan Mall yang besar. Berikut dalam tabel III yang termasuk 10 perusahaan internasional terbesar di negara berkembang yaitu:⁵¹

Tabel III
10 Perusahaan Transnasional Terbesar di Negara-Negara Berkembang
Ranked by Foreign Assets in 1999
Assets and Sales Figures in US\$ millions

Corporation	Home Country	Industry	Foreign Assets	Total Assets	Foreign Sales	Total Sales
1. Hutchinson Whampoa Ltd.	Hong Kong, China	diversified	48,532	2,107	7,132
2. Petroleos De Venezuela	Venezuela	Petroleum	8,009	47,250	13,332	32,600
3. Cemex S.A	Mexico	Construction	6,973	11,896	2,504	4,841
4. Petronas	Malaysia	Motor Vehicles	31,992	...	15,957
5. Samsung Co.	Korea	Diversified/Trade	5,127	21,581	6,339	37,180
6. Daewo Co.	Korea	Diversified/Trade Electronic	16,460	18,618
7. LG. Electronic Co	Korea	Diversified/Trade	4,215	17,273	6,383	15,590
8. Sunkyong Group	Korea	Energy/Trading	4,214	34,542	10,762	43,457
9. New World Development Co.	Hong Kong	Chemicals Construction	4,097	14,789	368	2,259
10. Samsung Electronics Co.	Korea	Electronic/Electrical Chemicals	3,907	25,487	5,214	28,024

Sumber: *World Investment Report 2001*

Sifat dasar perusahaan internasional merupakan bisnis yang kegiatannya yang didukung oleh investasi modal asing yang memiliki aktivitas penambahan

⁵¹ Ibid, hal. 17

nilai dari satu negara. Karena koorparasi ini baik bergerak dalam sektor bisnis maupun pemerintah. Hal ini bisa dikatakan bahwa aktivitas koorparasi international mampu mempengaruhi perekonomian suatu negara. Hal ini bisa dilihat dengan hengkangya industri elektronik Panasonic Indonesia tahun 2001 yang mengakibatkan pada stabilitas ekonomi dan menambah pengangguran.

Banjirnya produk-produk korporasi international mengakibatkan masyarakat munculnya jiwa konsumenrisme semakin tinggi. Perilaku masyarakat cenderung dibentuk oleh pengaruh pasar. Akibatnya sektor industri nasional bangkrut dan fondasi ekonomi Indonesia selalu dikontrol oleh rezim international. Ketergantungan tersebut pemerintah tidak jeli melihat pangsa pasar, yang lebih mengutamakan investor asing tanpa memperhatikan aset-aset ekonomi national. Sehingga keuntungan mengalir ke negara-negara maju dan Indonesia menjadi obyek eksploitasi baik secara sumber daya alam maupun manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Harwanto Dahlan bahwa, pemerintah Indonesia lebih mengutamakan industri yang tidak menguntungkan lagi (*sunset industry*). karena produksinya industrinya bersifat ISI (*Industri Subtitusi Impor*) alias untuk pasar dalam negeri.⁵² Sebaliknya indutri-indutri manufaktur diberikan pada investor asing seperti Jepang, Taiwan dan Korea.

⁵² Harwanto Dahlan, *Menyiapkan Indonesia Paska IMF, Indonesia Keluar Dari IMF*, Op. Cit. hal.380

3. World Bank

Lembaga multilateral World Bank yang mempunyai nama resmi IBRD (International Bank for Reconstruction Development), muncul akibat adanya Perang Dunia Kedua yang dimana negara-negara dunia mengalami depresi ekonomi. World World Bank didirikan untuk memberikan utang dalam memperbaiki pembangunan ekonomi dan rekontruksi kembali.

Lembaga ini memberikan utang kepada negara-negara yang mengalami proses pembagunan yang memerlukan dana yang sangat besar. Sehingga dibentuk World Bank untuk memberikan utang negara-negara berkembang, dengan mengharuskan melakukan kebijakan SAPs (*Structural Adjustment Programmes*). Sehingga dalam kebijakannya negara berkembang harus melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Seperti yang tercantum dalam kanan tangannya IMF, perjanjian Indonesia dan IMF yang dikenal *Letter of Intent*. Yang selalu mengutamakan tiga pilar privatisasi, deregulasi dan liberalisasi pasar.

Kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan negara berkembang karena tidak didukung perekonomian nasional yang kuat, yang terjadi adalah negara berkembang terjat dalam belunggu utang luar negeri. Dan APBN negara membengkak karena untuk membayar utang sehingga mengakibatkan alokasi sektor publik terpotong dan pencabutan subsidi untuk rakyat.

Hal ini terjadi seperti di Indonesia, melakukan privatisasi sumber daya air (UUSDA), pencabutan subsidi migas akibat UU No.22 Tahun 2001, pengurangan tarif impor dan lain-lainnya.

4. World Trade Organization (WTO)

WTO awalnya bernama GATT, melalui putaran Uruguay negara-negara industri berusaha untuk mencampuri urusan ekonomi Dunia Ketiga, demi keuntungan perusahaan-perusahaan mereka. Sebagai akibatnya tak bisa tidak adalah muncullah tata ekonomi dunia yang sangat timpang.

Kesepakatan perdagangan multilateral pertama diakui dunia adalah perjanjian tentang Tarif Umum tentang Bea dan perdagangan atau GATT (*General Agrerment on Tariffs and Trade*) pada tahun 1947. Berdirinya GATT tidak lain akibat respons resesi ekonomi dunia pada tahun 1930-an akibat Perang Dunia Kedua yang diikuti oleh proteksi perdagangan oleh negara-negara dunia. Maka diperlukannya perluasan perdagangan international sebagai akibat perang.

Kemudian langkah inisiatif diambil PBB untuk mengadakan konferensi perdagangan dan Kesempatan Kerja di Havana yang kemudian menghasilkan Piagam Havana. Pada dasarnya GATT antara tahun 1947 sampai 1979 mengadakan tujuh kali putaran negoisasi perdagangan international. Yang dimana putaran keenam membahas penurunan bea, tapi ketujuh dikenal dengan Putaran Tokyo (1973-1979) yang mulai membahas hambatan-hambatan bukan tarif (non-tarif).⁵³ Seperti membahas masalah pembagunan, adanya subsidi yaitu pengadaan barang-barang pemerintah, adanya perlakuan yang berbeda atas perdagangan yang tidak adil. Yang kemudian pembedaan kepentingan pada anggota GATT menjadi dua yaitu Utara dan Selatan.

Setelah Putaran Tokyo, negara-negara maju mulai merasakan adanya memperluas sistem perdagangan dunia yang mencakup jasa dan hak kekayaan

⁵³ Hira Jhamtani, Jurnal WACANA, *Krisis dan Bencana Pembangunan*, Op.Cit. hal. 67

intelektual (HAKI) dan investasi, yang mendorong pertemuan kembali membahas agenda tersebut. Agenda tersebut dirasa penting oleh negara-negara maju tiga alasan yang melatarbelakanginya yaitu:⁵⁴

- a. Pertama, karena daya saing dalam perdagangan internasional tergantung pada penggunaan jasa yang semakin berkembang serta teknologi canggih.
- b. Kedua, adanya prospek menjual jasa dan ekspor barang dengan komponen teknologi canggih ke negara sedang berkembang.
- c. Ketiga, perlunya perluasan kesempatan investasi dari negara maju ke negara sedang berkembang. Artinya perdagangan barang yang padat pengetahuan, jasa dan perlindungan HAKI serta perluasan investasi merupakan isu penting negara maju.

Yang kemudian agenda tersebut menjadi agenda Putaran Uruguay pada bulan September tahun 1986 hingga bulan April 1994. Pada putaran Uruguay banyak negara Dunia Ketiga untuk menentang perundingan ini. Karena kepentingan negara-negara Utara yang ingin mendorong diadakannya liberalisasi tidak hanya dalam perdagangan barang, tetapi juga liberalisasi jasa dan investasi. Ditengah pertentangan itu kemudian lahirlah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk melaksanakan Putaran Uruguay yang pada dasarnya adalah perluasan atas mandat GATT.

WTO berbeda dengan GATT, kalau GATT hanyalah sebuah kesepakatan yang berkaitan mengenai bea produk manufaktur. Sedangkan WTO adalah mengatur liberalisasi perdagangan produk selain manufaktur yaitu adanya

⁵⁴ Log. Cid.

liberalisasi investasi dan jasa. Selain itu juga kesepakatan WTO mengikat pada negara anggotanya karena dalam Putaran Uruguay, terdapat ketentuan untuk melaksanakan berkelanjutan. Sehingga memaksa negara-negara selatan untuk menyepakatinya. Selain itu juga WTO juga merupakan rezim international yang mengatur perdagangan multilateral.

Ada empat hasil Putaran Uruguay yaitu:⁵⁵

- a. Perluasan akses pasar (*market acces*).
 - Penurunan bea masuk.
 - Penghapusan atau pengurangan hambatan bukan bea.
 - Penghapusan atau pengurangan terhadap hambatan perdagangan hasil tropis.
 - Penghapusan atau pengurangan hambatan terhadap hasil yang berasal dari sumberdaya alam.
 - Penataan kembali aturan permainan di bidang tekstil dan pakaian jadi.
 - Penetapan kembali aturan permainan di bidang perdagangan hasil pertanian yang masih mengandung distorsi dalam bentuk subsidi dan pembatasan kuantitatif terutama di negara maju.
- b. Penyempurnaan aturan GATT.
 - *GATT articles* (penyempurnaan aturan-aturan teknis dalam perjanjian GATT).
 - *Safeguards* (penyempurnaan aturan mengenai hak membatasi import impor dalam keadaan darurat walaupun impor dilakukan sesuai aturan GATT).

⁵⁵ Ibid.70-71

- *Subsidies and Countervailing*, (salah satu aturan hasil Putaran Uruguay Tokyo yang masih berupa codes, dan memerlukan perundingan khusus untuk memyerpurnakannya).
- *Dispute settlement* (penyempurnaan aturan dalam penyelesaian sengketa dalam GATT)

c. Penyempurnaan kelembagaan GATT.

Penyempurnaan lembaga GATT dilakukan dalam kelompok perundingan mengenai *functioning of the GATT system*.

d. Masalah-masalah baru (*new issues*)

- *Trade in service* (merumuskan aturan permainan di bidang perdagangan jasa-jasa).
- *Trade related aspect of intellectual property rights* (TRIPs) atau (merumuskan aturan permainan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak paten sebagainya).
- *Trade related Investment measures* (TRIMs) (tindakan dan kebijakan di bidang investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan dunia guna menerapkan disiplin dalam kebijakan investasi sehingga tidak distortif).

Sejak dibentuk WTO telah mengadakan Konferensi Tingkat Menteri atau KTM I. Konferensi pertama, di Singapura pada tahun 1966, yang dihadiri oleh organisasi non-pemerintah sebagai peninjau dan anggota WTO. Dalam konferensi ini mulai terlihat tidak transparannya negara-negara maju karena menegasikan kepentingan negara-negara berkembang. Karena agenda yang dibahas adalah

mengenani isu investasi, kompetisi pasar serta perbelanjaan pemerintah. Dan proses pengambilan keputusan didominasi oleh negara-negara maju.

KTM II yang diadakan di Jenewa, Swiss. Isu investasi mulai dibuka kembali, tetapi gagal karena mendapat protes dari kalangan organisasi non-pemerintah di Utara. Pada KTM II juga terjadi penolakan terhadap para pengunjung rasa dengan aparat yang menentang anti WTO untuk menuntut terhadap liberalisasi pasar.

Menjelang KTM III, negara-negara berkembang membentuk kelompok non-formal yang disebut *Like Minded Group* (LMG) untuk menghadapi dominasi kelompok Utara yakni Jepang, AS, Eropa dan Kanada. Pada KTM III yang diadakan di Seattle, terjadi tarik ulur kepentingan yakni LMG yang menginginkan agar kesepakatan Uruguay dikaji ulang dan masalah implementasi dibahas dalam KTM III. Tetapi dalam pra kondisi KTM III dominasi negara-negara Utara mulai terlihat kembali. Karena negara-negara Utara masih tetap bertahan terhadap isu liberalisasi investasi dalam bentuk MAI (Multilateral Agreement on Investment).

Alhasil, perundingan di Seattle gagal karena penentangan tidak hanya terjadi di dalam perundingan tetapi juga diikuti oleh gerakan unjuk rasa untuk menentang pertemuan tersebut yang lebih mengutamakan liberalisasi pasar. Karena tidak terjadi kesepakatan maka dokumen akhir kemudian diserahkan pada General Council. Gerakan ini menjadi catatan sejarah karena mampu menggagalkan pertemuan WTO di Seattle.

KTM IV yang diadakan di Doha pada November 2001 merupakan konferensi keempat setelah berdirinya WTO. Kalaupun dalam KTM III di Seattle

gagal tetapi Doha menghasilkan beberapa kesepakatan yang dapat diringkas sebagai berikut:⁵⁶

- a. WTO kembali ke relnya semula, setelah kekalahan di Seattle. Kini WTO kembali percaya diri sebagai lokomotif kapitalisme global yang paling dominan.
- b. Mempercepat arus perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi dunia, regional dan nasional melalui:
 - Percepatan ambisius agenda-agenda di bidang pertanian dan jasa.
 - Peluncuran dua perjanjian baru di bidang tarif dan industri dan lingkungan.
 - Diadakannya negosiasi kembali atas perjanjian yang telah ada, seperti perjanjian anti dumping.
 - Peluncuran prematur untuk peraturan perundingan baru (new round) yang akan diadakan pada tahun 2003
- c. Memperkuat WTO untuk:
 - Menghapus kebijakan yang pro konveresasi dan pengembangan masyarakat karena dianggap perdagangan.
 - Mengintensifkan kegiatan ekspor yang destruktif dalam bidang kehutanan, perikanan, pertambangan, fosil bahan baker, dan sumber daya alam lainnya.
 - Menentukan siapa-siapa yang mendapatkan sisa-sisa sumber daya alam, yang dimulai disektor perikanan, d) merumuskan secara unilateral kaitannya dengan berbagai perjanjian lingkungan multilateral.

⁵⁶ *Neoliberalisme.....Antara Doha dan Cancun, Op. Cit.,* hlm. 89-90.

d. Didirikannya bidang baru di dalam WTO yang bernama Trade negotiating Committee (perusahaan multinational) lewat proses yang tidak demokratis.

Menjelang KTM V yang akan diadakan di Cancun, Mexico pada bulan September 2003. mempermulus negara-negara Utara untuk melakukan dominasi, karena negara maju selalu mendorong mekanisme pasar bebas.

Pertemuan pasca di Cancun, diadakan di Hong Kong pada tanggal 13-18 Desember 2005. Pertemuan tersebut tidak terlihat kekuatan negara-negara berkembang untuk menentang terhadap dominasi negara-negara Utara. Walaupun pada pertemuan tingkat tinggi WTO mendapatkan penentangan dari sejumlah LSM, Gerakan Tani, dan demonstran. Bahkan terjadi represif terhadap para pengunjung rasa, sekitar 900 demonstran ditangkap termasuk 200 orang warga Indonesia yang menentang ANTI-WTO.⁵⁷

Dalam forum tidak ada perdebatan yang sangat signifikan bagi bangkitnya negara-negara berkembang, karena bentuk dominasi negara maju. Artinya perdebatan tidak seperti yang terjadi pada KTM III di Seattle yang menentang liberalisasi pasar. Karena isu yang dibahas seputar pencabutan subsidi yang dilakukan negara maju pada komoditas pertanian. Meski demikian pencabutan subsidi baru akan bisa dilaksanakan pada tahun 2013. Ada beberapa kesepakatan pertemuan WTO di Hong Kong yaitu:⁵⁸

- a. Penghapusan semua bentuk subsidi oleh negara maju untuk ekspor komoditas pertanian pada tahun 2013.
- b. Mendisiplinkan semua peraturan tentang ekspor, juga pada tahun 2013.

⁵⁷ Kompas, Senin 19 Desember 2005, hal. 8

⁵⁸ Ibid, Kompas.

- c. Semua subsidi untuk kapas di negara maju dihilangkan pada 2006.
- d. Penghapusan subsidi untuk komoditas pertanian yang dijual di dalam negeri negara maju, tanggal tidak ditentukan.
- e. Penurunan tarif untuk produk-produk industri non pertanian. Belum ada rincian tentang seberapa banyak dari produk-produk itu yang akan mengalami penurunan tarif.
- f. Setiap anggota WTO harus menyampaikan proposal soal kesediaan pembukaan pasar untuk sektor jasa, selambat-lambatnya pada Oktober 2006 (sektor jasa misalnya perbankan, asuransi dan pendidikan).
- g. Negara setuju membebaskan tarif impor untuk semua komoditas yang berasal dari negara termiskin di dunia. Negara termiskin di dunia itu, sekitar 32 negara, juga dibebaskan pengenaan kuota ekspor, atau setidaknya membiarkan masuk 97% (turun dari 99,9%) dari semua komoditas ekspor negara termiskin. Penurunan tariff dan penghapusan kuota untuk negara termiskin itu dimulai pada 2008, atau setelah Putaran Doha dirampungkan.
- h. Tanggal 30 April akan menjadi landasan untuk pembahasan liberalisasi perdagangan yang lebih luas, selain subsidi pertanian.

5. Consultative Group on Indonesia (CGI)

CGI merupakan lembaga keuangan yang anggotanya tergabung dalam IGGI kecuali Belanda yang anggotanya terdiri dari Australia, Belgia, Perancis, Jerman Barat, Amerika Serikat, Italia, Jepang, dan Inggris. Yang tidak lain merupakan wadah bagi para negara donator untuk Indonesia. Sidang pertama CGI dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juli 1992 di Paris, Perancis. Dalam sidang

tersebut pemerintah Indonesia mengajukan permohonan bantuan yang sama besarnya dengan komitmen IGGI tahun 1991/1992, yaitu sebesar 4,75 milyar dollar AS.⁵⁹

Sampai pada tahun 1997/1998 yaitu pada saat krisis, CGI telah memberikan bantuannya sebesar 5,299 milyar dollar AS. Dan mengalami kenaikan pada tahun 1998/1999 yaitu 7,894 milyar dollar AS. Pada tahun 2001 mengalami penurunan yaitu 4,766 milyar dollar AS, meskipun nilai mata uang tersebut cukup besar, hal ini dapat dilihat pada tabel IV.

Tabel IV
Pinjaman Luar Negeri Yang Disanggupi Dalam Sidang CGI
(Milyar Dollar AS)

Negara/Badan Kreditor	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
Jumlah	5,299	7,894	5,861	4,194	4,766
Bilateral	2,263	2,305	1,637	1,579	1,876
Multilateral	3,036	5,589	4,224	2,615	2,890

Sumber: Statistik Ekonomi keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Wadah tersebut dibentuk untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan modal dalam pembiayaan pembangunan dan bantuan utang untuk program-program kemanusiaan. Politik balas budi dijadikan jargon bagi negara-negara imperialis untuk membantu negara-negara pasca colonial dalam bentuk utang. Namun demikian, pemberian utang sebenarnya menjadi jerat baru agar Indonesia mampu dikontrol dan tergantung dalam memperbaiki perekonomian nasional. Setidak ada dua dampak utang luar negeri:

1. Utang menimbulkan ketergantungan Dunia Ketiga.

⁵⁹ Giri Tribroto, Kebijakan dan Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri, dalam Profil Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Permasalahannya, Pusat pendidikan dan Studi Kebank sentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 55

2. Hegemoni gagasan diantara para pengambil kebijakan untuk menyakini bahwa tiada jalan melakukan pembangunan di luar jalur kapitalisme.